

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Di bawah sistem saat ini, Indonesia memberikan banyak kekuasaan kepada daerah untuk menjalankan urusan mereka sendiri dalam artian pemerintah pusat melimpahkan segala kewenangan daerah ke pemerintah daerah masing-masing. Dengan begini dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah sebagai bentuk pelimpahan wewenang kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Ramdhani 2019).

Meskipun adanya hambatan yang terjadi namun pada era reformasi, era reformasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain Pertama, pada perubahan-perubahan pembangunan terjadi adanya pembatasan peran dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang berbeda dari masa orde baru. Kedua, proses perencanaan pengembangan dan pembangunan pemerintahan daerah (kabupaten, kota, dan provinsi) yang tadinya terbatas menjadi lebih leluasa karena pemberlakuan otonomi daerah yang tentu memudahkan untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahannya. Ketiga, pembaharuan proses pelaksanaan kepala daerah dilakukan secara langsung begitu pun pada pemilihan presiden sistem yang dilakukan secara langsung. Keempat, perubahan terjadi pada sistem parlemen, dimana pada pemerintahan tingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun pada pemerintahan tingkat daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) memiliki peningkatan keikutsertaan dalam pemerintahan serta turut berperan dalam proses perencanaan perubahan pembangunan yang ada di Indonesia (Fuady, 2012).

Fenomena politik ini terjadi karena tekanan politik yang membuat masyarakat sekitar memiliki keinginan untuk mandiri. Faktor – faktor yang terjadi karena perlu adanya kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun pemerintahan masyarakat. Keinginan untuk dimekarkan

berada tertinggal jauh dari daerah lainnya, serta adanya alasan *political history* yang menjadi dasar elite politik untuk melakukan pemekaran daerah (A. W. Muqoyyidin 2013).

Adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada tatanan pemerintahan di Indonesia berpengaruh juga terhadap pemerintahan daerah yang dimana seperti mengacu pada Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah menyebutkan bahwa pemerintahan daerah diberi otonomi yang luas untuk menjalankan pemerintahan daerah dengan semestinya. Pemberlakuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan daerah juga mengubah orientasi pembangunan tata kelola pemerintahan daerah yang semulaberprinsip efisiensi dan pertumbuhan, kini berubah menjadi prinsip kemandirian dan keadilan (Andik et al., n.d.). Proses pembangunan di daerah- daerah menjadi lebih terperinci di bawah pemerintahan daerah serta berjalannya pemerintahan daerah yang semestinya menimbulkan implikasi perubahan paradigma pembangunan yang menonjol.

Otonomi daerah di beberapa negara sudah berjalan dengan semestinya. Banyak negara-negara yang menerapkan otonomi daerah guna mempermudah pemerintahan pusat dalam mengelola pemerintahan daerah. Pada pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya mengacu atau berfokus pada tatanan hukum yang ada, melainkan berperan sebagai implementasi yang memiliki tuntutan globalisasi yang tentu harus diberdayakan melalui pemberian kewenangan pada daerah-daerah yang lebih luas, lebih nyata, memiliki tanggung jawab, serta diperlukannya kegigihan dalam menggali, memperoleh, serta memanfaatkan kondisi dan potensi yang sudah ada di daerahnya masing-masing untuk bisa lebih dikembangkan dan dihasilkan. Hal ini agar pemerintahan daerah bisa lebih fokus dalam meningkatkan potensi-potensi baik yang ada di daerahnya masing-masing.

Pembagian kekuasaan daerah dan pusat menjadi salah satu strategi berjalannya pemerintahan yang semestinya. Mampu menghindari adanya tumpang tindih kekuasaan serta mampu menghindari adanya

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemerintahan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang ada di Indonesia mampu memberikan kebijakan yang luas terhadap wilayah daerah, terkhusus pada wilayah kota dan kabupaten. Adapun pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan sebagai pengembalian kembali martabat masyarakat daerah yang sempat tenggelam karena mengalami gejolak krisis di dalam pemerintahan, serta peningkatan pengetahuan pendidikan politik di masyarakat daerah guna meningkatkan kualitas demokrasi di daerah yang lebih baik, lalu peningkatan efisiensi pelayanan publik yang lebih merata yang sebelumnya sempat mengalami ketidakmerataan dalam pelayanan publik yang memang terjadi karena kurangnya perhatian dan fokus dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, dan peningkatan pembangunan di daerah-daerah yang belum sempat terlaksana atau mengalami banyak kendala. Hal-hal ini diharapkan menjadi warna baru bagi pemerintahan untuk dapat menghasilkan suatu pemerintahan yang berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat (good governance).

Pemerintahan daerah dengan orientasi yang baik menimbulkan proses penyelenggaraan pembangunan yang mengarah pada desentralisasi. Desentralisasi merupakan proses pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab mengenai berjalannya pemerintahan dari pusat yang diberikan langsung kepada pemerintahan daerah. Desentralisasi dilakukan untuk menghindari adanya kesenjangan disparitas tiap-tiap daerah dalam melaksanakan pencapaian guna mencapai tujuan bersama.

Kesejahteraan rakyat harus menjadi fokus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui pembangunan-pembangunan di daerah bertujuan untuk membantu adanya peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat daerah, baik dari pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang sosial, maupun pembangunan di bidang Pendidikan di harapkan memiliki keberlanjutan yang terlihat. Terlepas dari adanya gejolak tumpang tindih kekuasaan dari elite-elite politik, pertumbuhan daerah di Indonesia juga ada yang terbilang mencapai pertumbuhan yang

signifikan. Terhambatnya pembangunan juga bisa terjadi karena daerahnya yang memiliki kekurangan sumber-sumber serta fasilitas yang ada di daerahnya. Adapun hambatan yang menyebabkan terlambatnya laju pembangunan di daerah karena kurangnya prasarana sebagai penghubung dan kurangnya sarana fasilitas internal seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, serta investor.

Munculnya elite politik lokal dengan desentralisasi yang lebih luas dalam pelaksanaan tatanan pemerintahan mewujudkan demokratisasi yang akhirnya terjadi dinamika pemekaran wilayah di daerah-daerah. Hal ini terjadi bukan karena peran elite-elite politik yang dinilai berhasil dalam melaksanakan tatanan pemerintahan lokal seperti pelaksanaan pembangunan yang diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta adanya pemerataan, namun justru menimbulkan masalah dimana terjadi karena adanya pembangunan-pembangunan daerah yang tidak merata serta tidak mampu menjaga kesejahteraan masyarakat. Ketidakteraturan dalam pembangunan bisa terjadi karena ketidaksesuaian elite politik dalam proses pelaksanaan pemerintahannya. Terjadinya ketimpangan-ketimpangan dalam proses pembangunan daerah bisa terjadi jika dalam prosesnya para elite politik tidak memiliki kendali penuh. Artinya selalu ada tumpang tindih kekuasaan dalam proses pelaksanaan pemerintahan daerah.

Namun selain di sisi harapan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memaksimalkan pembangunan, munculnya wacana pemekaran wilayah menjadi perbincangan menarik yang menimbulkan adanya kontroversi dari kalangan masyarakat hingga kalangan elite politik. Adanya fenomena ini terjadi bukan semata-mata sebagai kebijakan dari pemerintahan daerah semata namun tentu adanya keterlibatan dari elite-elite politik. Hal ini yang membuat masyarakat dan beberapa elite politik lainnya mempertanyakan apa urgensi dari fenomena tersebut. Namun jika melihat langsung pada keadaan masyarakat, adanya pemekaran wilayah dapat memecahkan permasalahan ketidakadilan dalam pembangunan wilayah dan ketertinggalan wilayah-wilayah terpencil yang sulit di jangkau oleh

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemekaran wilayah juga menjadi bentuk dari adanya pembentukan wilayah administratif baru yang terjadi di wilayah provinsi, wilayah kota, hingga wilayah kabupaten. berlandaskan hukum yang kuat, pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonomi baru dapat dilakukan dengan banyaknya pertimbangan yang matang. Secara yuridis landasan dalam pembentukan daerah mengacu pada pasal 18 Undang-undang 1945 mengenai pembagian daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan pembagian daerah-daerah yang lebih kecil seperti Kota/Kabupaten. dalam proses pemekaran wilayah memerlukan adanya proses-proses dan tahapan-tahapan yang tidak mudah. Dimulai dari kelayakan teknis dan administrasi, hingga proses politik di dalamnya, Mengacu pada peraturan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah proposal pemekaran memerlukan dukungan dari DPR.

Dalam gambaran fenomena ini, dapat dijadikan gambaran seperti yang terjadi di daerah besar Kabupaten Bandung Barat. Begitu pula dengan Kabupaten Bandung Barat yang mana merupakan salah satu wilayah besar yang ada di Provinsi Jawa Barat dan sebelumnya tergabung dengan wilayah Kabupaten Bandung yang menjadi induk dari Bandung Raya. Awal dari terbentuknya Kabupaten Bandung Barat bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Saat itu Ibu Kota Kabupaten Bandung Barat terletak di Kecamatan Ngamprah.

Tabel 1.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Desa
1	Batujajar	7
2	Cikalongwetan	13
3	Cihampelas	10

4	Cililin	11
5	Cipatat	12
6	Cipeundeuy	12
7	Cipongkor	14
8	Cisarua	8
9	Gununghalu	9
10	Lembang	16
11	Ngamprah	11
12	Padalarang	10
13	Parongpong	7
14	Rongga	8
15	Sindangkerta	11
16	Saguling	6

Sumber : Data KBB

Adanya wacana dari pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Barat sudah terjadi semenjak tahun 1999. Hal ini mengacu pada landasan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh H.U.Hatta Djati Permana, S.Ip kemudian melakukan pengajuan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu dijabat oleh H.Obar Sobarna, S.Ip. Adapun alasan-alasan utama dari tuntutan pemekaran wilayah di Kabupaten Bandung Barat, karena jika kita mengacu pada letak dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung cukup luas sekitar (2.324.84 km²) dengan masyarakat yang juga banyak sekitar 4.300.000 jiwa menyebabkan adanya permasalahan dalam proses pembangunan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh Pemerintah Pusat. Hal ini juga menyebabkan adanya

kecemburuan sosial dari masyarakat daerah terhadap masyarakat yang mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Pusat. Bukan hanya itu, permasalahan lain yang muncul dalam masalah administratif yang harus dipenuhi oleh masyarakat daerah dianggap terlalu jauh dari jangkauan jika harus selalu mengurus hingga ke pemerintah pusat terlebih adanya keterbatasan dari masyarakatnya. Muncul juga adanya isu bahwa pemekaran wilayah menjadi bentuk dari memenuhi hasrat elite politik, karena dinilai hanya untuk kepentingan politik serta terjadinya permainan dari elite-elite politik yang terlibat baik itu elite lokal maupun elite nasional.

Secara umum, pemekaran Kabupaten Bandung Barat dipicu oleh masalah pelayanan publik pada saat itu, yang memiliki dampak besar pada sektor-sektor lainnya. Pada periode tersebut, Kabupaten Bandung memiliki wilayah yang sangat luas, dengan pusat pelayanan publik yang berlokasi di Soreang. Hal ini membuat masyarakat di wilayah Gunung Halu, Cipeundeuy, Sinangkarta, Lembang, dan daerah sekitarnya menghadapi kendala dalam mengurus administrasi sehari-hari seperti KTP, Akta Kelahiran, surat keterangan, dan izin-izin lainnya. Proses administratif manual yang memakan waktu lama menjadi beban tersendiri bagi penduduk di wilayah ini.

Ketimpangan antara induk di kab bandung dengan wilayah barat terjadi yaitu yg pertama, pelayanan publik. Pelayanan publik tidak bisa dilakukan secara maksimal mengingat jangkauan dan wilayah yang terlalu luas. Sehingga pelayanan publik terganggu. Kedua yaitu pemerataan pembangunan, yang terfokus pada daerah soreang dan sekitarnya, sehingga untuk wilayah yang berada di bandung barat menjadi tertinggal. Wilayah Bandung bagian barat yang lebih maju hanya berada di daerah kawasan-kawasan wisata seperti Ciwidey. Hal ini berbeda dengan kondisi seperti di wilayah gunung halu ataupun cililin. Itu apabila dilihat dari aspek sosial budayanya.

Di sisi ekonomi, dimana di daerah selatan itu merupakan daerah kantung-kantung kemiskinan. Dimana kebanyakan penduduk disana hanya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri sebagai solusi untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Banyak negara yang dituju oleh mereka seperti arab saudi, malaysia, dan hongkong. Walaupun mereka adalah pahlawan devisa. Tetapi hal ini justru membuktikan bahwa bahwa daerah itu daerah tertinggal. Sisi ekonomi ini sangat dipengaruhi dari aspek-aspek lainnya seperti pelayanan publik, pemerataan pembangunan, sosial budaya akan berpengaruh terhadap berjalannya kehidupan masyarakat.

Dampak dari pelayanan publik yang jauh ini berdampak luas pada Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan-kecamatan di wilayah barat mengalami keterbelakangan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan dan infrastruktur. Kondisi infrastruktur yang buruk menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat karena akses logistik menjadi terbatas dan terhambat.

Akibatnya, muncul keinginan kuat dari masyarakat untuk memisahkan wilayah Kabupaten Bandung Barat menjadi entitas otonom yang dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Pemekaran wilayah ini dianggap sebagai langkah yang perlu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Ini merupakan contoh nyata bagaimana masalah pelayanan publik dapat menjadi pendorong utama dalam proses pemekaran wilayah.

Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi yang sangat besar, dengan berbagai sumber daya alam, budaya, dan karakteristik unik di setiap wilayahnya. Namun, kendala utama yang menghambat potensi ini adalah lambatnya pelayanan publik dan fokus yang cenderung terpusat di wilayah Kabupaten Bandung (Soreang). Hal ini berdampak negatif pada perkembangan wilayah lain di Kabupaten Bandung Barat.

Keberagaman potensi di Kabupaten Bandung Barat sangat mencolok. Wilayah ini dikenal dengan keindahan alamnya, seperti pegunungan, danau, serta objek wisata lainnya. Selain itu, kekayaan budaya dan warisan sejarahnya juga menjadi daya tarik tersendiri. Namun, semua potensi ini belum optimal dimanfaatkan karena lambatnya pelayanan publik dan perhatian yang lebih besar pada wilayah pusat administrasi.

Pelayanan publik yang lambat, terutama dalam hal administrasi, telah membuat penduduk di berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung Barat mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai dokumen dan izin. Hal ini memperlambat perkembangan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur di wilayah tersebut. Diperlukan perubahan dalam pendekatan pelayanan publik, di mana wilayah-wilayah yang lebih terpencil dan terpinggirkan juga mendapatkan perhatian yang layak. Pemekaran Kabupaten Bandung Barat menjadi langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi berbagai potensi wilayahnya untuk berkembang. Dengan pemekaran ini, diharapkan pelayanan publik dapat lebih merata dan efisien di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat, sehingga potensi-potensi yang ada dapat dioptimalkan dan masyarakatnya dapat merasakan manfaatnya secara merata.

Dalam pemekaran wilayah ini juga tidak terlepas dari peran Tokoh-tokoh masyarakat yang turut aktif dalam menyuarakan adanya pemekaran wilayah. Pada tanggal 9 Agustus 1999, akhirnya tokoh-tokoh bersatu dan bergabung membentuk forum-forum tertulis yang berkembang dari tahun ke tahun, diantaranya :

- Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Wilayah Kabupaten Bandung Barat dipimpin oleh Drs. H. Endang Anwar.
- Forum Peduli Bandung Barat dipimpin oleh Asep Suhardi.
- Forum Bandung Barat Bersatu dipimpin oleh empat orang diantaranya H. Zaenal Abidin, Drs. Ade Ratmadja, Asep Suhardi, dan Asep Ridwan Hermawan.
- Forum Pemuda Bandung Barat dipimpin oleh Eman Sulaeman, SE.

Terlepas dari pembentukan forum-forum pergerakan dengan pemimpin yang dikatakan banyak, pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Barat juga di dukung oleh para tokoh PNS diantaranya, Drs. H. Pandji Tirtayasa, MSi., Drs. H. Megaharry Pudjiharto, M.Si, dan Ir. Donny Widiawan, MS. Bukan hanya dari kalangan, pembentukan wilayah Kabupaten Bandung Barat yang memang sebelumnya didorong oleh aspirasi masyarakat juga tidak ketinggalan membentuk persatuan dari LSM dengan forum-forum yang digabungkan dalam satu kesatuan, yaitu Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) dengan pimpinan umum Drs. H. Endang Anwar.

Adanya peran andil dari tokoh – tokoh yang juga terlibat dapat memainkan peran penting dalam memobilisasi dukungan masyarakat, memberikan masukan tentang kebutuhan lokal, dan memastikan partisipasi aktif warga dalam membantu dalam proses pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Keterlibatan dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses pemekaran ini membantu banyak dalam proses pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Barat, seperti dari beberapa tokoh ini memiliki berbagai latar belakang dan kemampuan ekonomi yang beragam. Salah satu aspek penting adalah bahwa sebagian dari mereka memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dan bersedia berkorban secara materi dalam usaha pemekaran Kabupaten Bandung Barat. Keikutsertaan tokoh-tokoh yang mampu secara ekonomi menjadi penting karena mereka dapat menyokong berbagai kebutuhan yang diperlukan selama proses pemekaran serta membantu banyak dalam kebutuhan-kebutuhan yang jumlahnya tidak sedikit. Hal ini termasuk biaya untuk pengadaan konsultan, pendanaan untuk pertemuan-pertemuan penting, dan akomodasi untuk mengundang komisi dari Jakarta atau berbagai pihak terkait. Dengan dukungan finansial yang mereka sediakan secara sukarela, proses pemekaran bisa berjalan dengan lancar tanpa bergantung pada dana dari pihak eksternal.

Dukungan masyarakat terhadap pemekaran Kabupaten Bandung

Barat sangatlah signifikan, dan respons positif ini mencakup berbagai elemen masyarakat yang beragam. Tokoh agama, mahasiswa, tokoh budaya, serta perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat turut berperan dalam mendukung gerakan untuk mengusulkan Bandung Barat menjadi sebuah wilayah otonom.

Munculnya aspirasi masyarakat ingin memisahkan diri dari kabupaten Bandung itu muncul tahun 1999. Pada waktu itu aspirasi memisahkan diri dari kab Bandung terdiri dari 14 kecamatan. Dari lembang sampai gunung halu, dengan batas paling timur yaitu Cipatat. Aspirasi masyarakat ini kemudian di musyawarahkan.

Dengan dukungan dari berbagai komponen masyarakat ini, gerakan untuk mengusulkan Bandung Barat menjadi wilayah otonom berhasil memperoleh momentum dan mendapatkan dukungan luas hal ini sebagai bentuk keterlibatan masyarakat yang juga ingin mendapatkan kesejahteraan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pemekaran ini bukan hanya inisiatif dari elit politik, tetapi juga respons positif dan aspirasi kuat dari masyarakat yang ingin melihat wilayahnya berkembang dan melayani kebutuhan penduduk dengan lebih baik.

Hingga di tanggal 30 Agustus 2003, KPKBB bersama masyarakat melakukan deklarasi di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah. Hal ini sebagai bukti bahwa masyarakat beserta KPKBB bersama-sama berupaya membangun komitmen dalam memperjuangkan aspirasi guna terbentuknya daerah Otonom Baru Kabupaten Bandung Barat.

Dengan kondisi faktual yang ada, terlepas dari adanya kekompakan masyarakat Bersama-sama dengan KPKBB dalam proses pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru disinyalir bermuatan politik, hal ini yang membuat kerugian bagi masyarakat dan hanya menguntungkan pihak-pihak elite. Substansi yang terjadi di masyarakat bukan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Adanya pemekaran wilayah yang ingin menjadi pembaharuan dalam otonomi daerah dalam mempercepat

pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini justru menyebabkan ketidaksiharian dari substansi otonomi daerah yang tidak tepat sasaran. Dalam ranah nasional maupun daerah, keduanya tidak terlepas dari logika kekuasaan. Adanya rekayasa politik di dalam pemekaran wilayah dapat menjadi penghambat dalam pemekaran wilayah atau pembentukan daerah baru, walaupun keadaannya sulit diakui bahkan dibuktikan.

Penting untuk ditekankan bahwa tidak semua daerah pemekaran mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai otonomi daerah dan mencapai tujuan utamanya. Pada saat itu wacana mengenai kegagalan dan keberhasilan sudah bermunculan mengenai daerah otonom baru. Untuk menjadi yang terbaik Indonesia perlu dan membuntuhkan adanya penataan yang baik dalam pembangunan daerah, harus ada cetak biru pemekaran daerah untuk mengatur kuantitas dan kualitas otonomi daerah di Indonesia, sekaligus persyaratan dan metode penilaian kinerja untuk semua otonomi daerah baru di Indonesia. Hal ini sangat dibutuhkan, mengingat pembangunan daerah di seluruh wilayah Indonesia merupakan sendi-sendi keberhasilan pembangunan nasional Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, urgensi atas desain besar penataan daerah sangat penting (Endah 2011).

Namun, berbicara mengenai euforia reformasi dalam pemekaran daerah dapat berakibat kontra produktif dan melahirkan kegagalan DOB tersebut jika tidak dirancang secara matang serta pertimbangan yang objektif. seperti dikatakan Prud'homme (1995 : 1):

"... But decentralization measures are like some potent medicines : they must be taken at taken at the right time, the right dose, and forthe right illness to have desired salutary effect. Taken improperly, they can harm rather than heal"

Maka dari itu, untuk mengetahui bagaimana keterlibatan elite-elite politik lebih jauh, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peran Elite - Elite Politik Dalam Proses Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Sebagai Daerah Otonom Baru."**

Namun apakah dalam proses pembentukan Kabupaten Bandung dilakukan secara optimal berkolaborasi untuk membentuk daerah otonom baru sebagai upaya kesejahteraan masyarakat.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran-peran elite politik dalam proses pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Barat?
2. Apakah ada upaya kolaborasi atau aliansi antara elite politik dengan tokoh lokal dalam membangun wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai Daerah Otonom Baru?
3. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat proses pembentukan Kabupaten Bandung Barat sebagai Daerah Otonom Baru?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Elite Politik dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui apakah ada kolaborasi antara elite politik dengan tokoh lokal dalam membangun wilayah Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang terjadi dalam proses pembentukan Kabupaten Bandung Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat menjadi bahkan referensi dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya, juga mampu mengembangkan teori pemahaman mengenai politik lokal dan otonomi daerah terutama mengenai pemekaran wilayah.

2. Manfaat Praktis

Dalam proses penulisan ini, manfaat yang didapat sebagai skripsi. Diharapkan mampu menjadi salah satu bahan informasi bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung Barat dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan hal tersebut bisa jadi karena masih terbatasnya penelitian tentang hal tersebut. Dan informasi mengenai pemekaran wilayah yang terjadi.

1.5. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan suatu alur pemikiran penulis yang mana nantinya dijadikan sebagai skema penelitian atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini (Beli 2015).

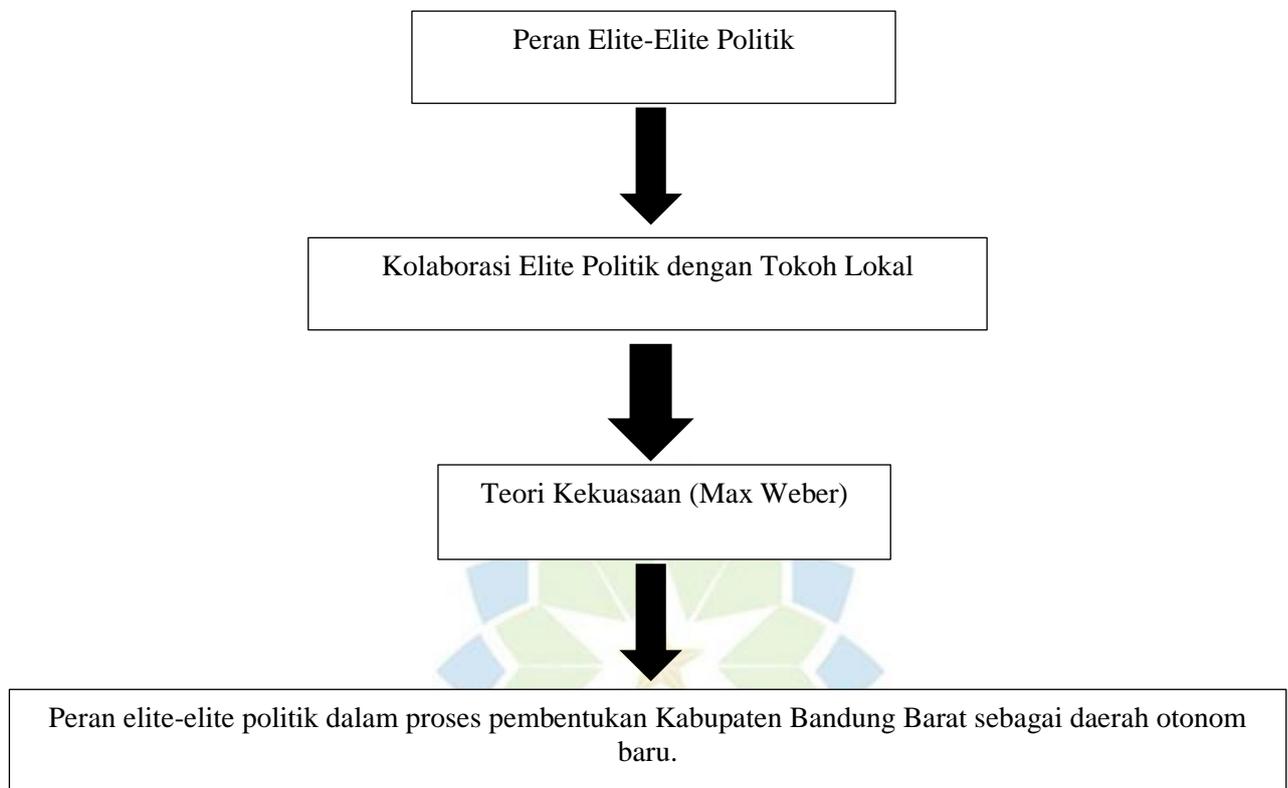
1. Kerangka Teoritis

Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan berusaha membahas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pembahasan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep dan teori yang ada hubungannya untuk membantu menjawab masalah penelitian. Adapun teori yang dipakai dalam menyusun penelitian ini adalah Pemekaran Wilayah, Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Elit Politik dan *Contentious Politics*.

2. Kerangka Konseptual

Dalam hal ini pokok pembahasan yang diambil dalam penelitian ini adalah tentang Politik dan Otonomi Daerah. Dari tema tersebut, penulis mengambil judul “*Peran Elite - Elite Politik Dalam Proses Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Sebagai Daerah Otonom Baru.*” Hal yang membuat penulis tertarik untuk mengambil tema dan judul tentang otonomi daerah dan pengimplementasian pemekaran wilayah ini adalah karena hal ini menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam.

Berbicara mengenai rencana pemekaran Wilayah Bandung Barat jika mengacu pada Politik dan Otonomi Daerah Pemekaran wilayah. Hal yang terlihat sejak suatu wilayah mencoba untuk memekarkan diri bisa dikatakan ada beberapa hal yang berubah seperti bertambahnya kesejahteraan rakyat, kemudahan manajemen pemerintahan, dan meratanya pembangunan infrastruktur. Namun, tidak bisa dipungkiri pula bahwa proses pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Barat ini melibatkan kalangan elite politik seperti para anggota DPRD, hingga elemen masyarakat yang membentuk suatu organisasi bernama organisasi Independen Pengawas Pembangunan dan Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung barat (KIP4 KBT) yang mana hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pemekaran (Masridah 2019).



Gambar 1.1 Skema Konseptual

1.6. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terus dilakukan oleh para peneliti dalam rangka mencari kebenaran baru di berbagai bidang Ilmu politik, teknologi, atau bahkan sosial. Termasuk penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Yayan Amroni (2019) yang berjudul “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2016”.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Yonathan Fandri Agustino yang berjudul “Kepentingan Elit Politik Lokal Terhadap Pemekaran”.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Lifia Anis Tahara Lantara (2016) yang berjudul “Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap

Pembangunan dan Pelayanan Publik Di Kecamatan Tana Lili
Kabupaten Luwu Utara”.

